

FUNGSI AGAMA DALAM MENGATASI KRISIS DI ERA KESEJAGATAN

Oleh I Wayan Winaja
Dosen Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

Recognition of the world as the word as one place to make the boundaries of the country to be relatively weak (run down), and the growing awareness of global (Global Consciousness) in humans. This new awareness can break through primordial exclusivity of social unity, kasatuan cultural and religious unity. This is a consequence of the spirit of liberty. In connection with it will be studied the meaning of religion in dealing with crises on kesejagatan era. Kesejagatan and challenges in the era of the third millennium is how to unite and draw on all three global forces (technological, economic, and moral) it wisely, by making the power of religion as a cornerstone. The crisis that swept the nation lately can not be separated from the low spirit-lived religious spirit of the human. Thus, religion should be used as a way of life, so it does not become the last bastion, but instead into the energy of the life of the nation itself. The concepts of honesty, openness, hard work, simplicity is essential in the kesejagatan are concepts that are rooted in religion. Would need to ponder together, to raise awareness on the development of the times, namely the concept of leadership, ethics, morals, education, sincerity, honesty, and the importance of human resources (HR).

Keywords: Function of Religion, Crisis, Kesejagatan Era

I. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengantarkan manusia pada sebuah dunia yang penuh misteri, kontradiksi, dan aroma citraan-citraan baru. Wajah baru kebudayaan yang “sexy” menimbulkan kekuatan-kekuatan hipnotis, keterpesonaan, kemabukan, dan ekstasi. Manusia mengalami berbagai perubahan akibat pertemuan antara nilai dan kebudayaan global. Pengakuan tentang dunia sebagai *the word as one place* menjadikan batas-batas wilayah negara menjadi relatif melemah (*run down*), dan berkembangnya kesadaran global (*Global Consciousness*) dalam diri manusia.

Di era ini wacana di atas menjadi sangat dominan, ditandai dengan mencuatnya kesadaran manusia akan kemerdekaan, hak asasi, dan saling ketergantungan antar bangsa. Kesadaran baru ini dapat menerobos eksklusivitas primordial dari kesatuan sosial,

kasatuan kultural, dan kesatuan religius. Konsekuensinya, ekspresi dan tuntutan akan kemerdekaan, serta hak asasi (pribadi dan kelompok) yang berkedaulatan tidak dapat dielakkan. Salah satu indikasinya adalah kesadaran mengekspresikan pendapatnya, dari sistem sosial dan politik yang eksploitatif semakin vokal. Seperti tuntutan dari suatu kelompok minoritas, etnik, religius, sekuleritas dalam gender,¹ akan hak dan kebebasan. Dalam kaitan masalah-masalah, seperti kemiskinan, *ethnic, cultural, minorities gender*; tidak lagi semata wacana lokal, tetapi telah mengglobal. Hal lain yang sangat mencolok pada era global, adalah terjadinya suatu “krisis kredibilitas” tentang keabsahan religius tradisional, sebagai dampak dari pengakuan *the word as one place*, melemahnya batas-batas wilayah negara, dan berkembangnya kesadaran global (*Global*

Consciousness). Dampaknya bukan hanya pada level tingkah laku sosial yang dapat diamati secara obyektif, tetapi juga pada level kesadaran, munculnya dikotomi antara yang disebut “sektor umum” dan “sektor pribadi” dalam struktur sosial.

Dikotomi dua sektor tersebut diatas membawa dampak pada kehidupan religius seseorang. Di sini akan terjadi privatisasi agama, di mana seseorang tidak lagi dengan sendirinya (*take for granted*) harus memeluk agama yang diwariskan secara historis kepadanya, karena seseorang telah menemukan kemerdekaan dalam hal memilih dan menentukan pilihan bagi dirinya sendiri (*personal*).

Di era global yang terbuka dan beragam secara sosial, seseorang bebas untuk memilih atau tidak memilih *value* tertentu bagi dirinya. Ini adalah konsekuensi dari spirit *liberty*. Jika seseorang salah pilih mengenai masalah-masalah tersebut di atas, maka ia akan kehilangan tempat perteduhan yang merupakan tuntunan hidupnya. Dengan demikian, ia laksana terlempar keluar dari institusi tradisional. Hilangnya tempat “berteduh” itu dan mengembara di belantara keberagaman dan terbuka akan dapat menyebabkan terjadinya *homelessness*² (tanpa tempat perteduhan).

Fenomena ini memberi indikasi bahwa masalah-masalah pokok pada kesejagatan, adalah keberagaman dan pencarian identitas. Keberagaman terjadi pada dua level, yakni komunal dan individual. Pada level komunal, keberagaman membawa krisis integritas suatu komunitas primordial. Keberagaman akan mereduksi perekat komunitas komunal, sehingga keterikatan satu kesatuan sosial menjadi relatif lemah. Komunitas primordial ini kini terintegrasi ke dalam satu kesatuan sosial yang lebih besar, yakni komunitas negara-bangsa yang majemuk, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Negara-negara Persemakmuran. Kondisi ini membutuhkan suatu “perekat baru” sosial. Pada level

individual, dampak keberagaman menyebabkan seseorang mulai kehilangan tempat perteduhan, merasa kehilangan pegangan hidup, krisis identitas, dan terasing. Sebelum menjawab permasalahan tentang makna agama dalam mengatasi krisis di era kesejagatan, maka terlebih dahulu diuraikan pendapat para tokoh tentang agama.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pandangan Tokoh-Tokoh Tentang Agama

Karl Marx menyatakan bahwa agama merupakan hasil ciptaan suatu struktur masyarakat yang tidak adil dan ia hanya berfungsi secara efektif bila ia bertindak sebagai pembawa revolusi kesadaran kelas untuk ke luar dari situasi ketidakadilan (dalam Basis, 1981:438). Inti pandangan Marx ini menekankan pada peranan agama dalam situasi atau sejarah ketidakadilan. Kehadiran agama secara tidak sadar dapat dilihat sebagai pendukung struktur sosial yang mengasingkan manusia dari kemampuannya untuk hidup secara lebih layak dan manusiawi. Untuk penguasa, agama hadir untuk melegitimasi wewenang kekuasaan, dan untuk yang dikuasai, agama hadir untuk membina ketidaktahuan mereka dalam proses ketidakadilan. Aspek fungsional yang terdapat dalam pandangan Marx ialah, bahwa agama melegitimasi struktur sosial dalam struktur masyarakat yang tidak adil dan sekaligus dapat menimbulkan konflik, menyadarkan kelas-kelas masyarakat yang tertindas.

Thomas F. O’Dea (dalam buku “*The Sociology of Religion*. 1978:1-9) menyatakan agama adalah jawaban manusia terhadap situasi kritis dari kehidupannya. Situasi kritis itu digambarkan dalam tiga term, yakni situasi ketidakpastian, situasi ketidakberdayaan, dan situasi kelelahan. Situasi yang demikian itu sudah menjadi problem eksistensial sehingga dibutuhkannya cara manusia untuk mengatasi secara menyeluruh. Di sinilah agama

berperanan. O'Dea memberi makna tertinggi, yaitu agar semua bidang kehidupan, seperti sistem sosial, sistem kepercayaan, kehidupan etis, dan sebagainya memperoleh tempat dan arah yang selayaknya.

Secara eksplisit O'Dea mendekati fenomena agama dalam kerangka relasinya dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat universal. Bidang-bidang itu, seperti kebudayaan, individu, dan masyarakat. Ditegaskan bahwa agama memiliki kecenderungan untuk mengidentifikasi peran nilai-nilai positif. Berger menekankan bahwa agama itu berhubungan erat dengan satu sistem arti, yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu untuk mengungkapkan sistem arti itu, yakni bahasa dan kemampuan bahasa untuk menginterpretasikan pengalaman-pengalaman dalam rangka memberi kualitas pada sistem arti yang sudah ada. Dengan demikian, baik secara sosial maupun secara pribadi agama dipengaruhi dan sekaligus mempengaruhi sistem arti itu, agar selalu ada situasi yang aman untuk pribadi, untuk kelompok sosial yang beraneka ragam.

Bagi Max Weber, agama sifatnya otonomi, tidak terikat oleh bidang-bidang tertentu. Ketidakterikatan pada bidang-bidang tertentu oleh Weber dilihat sebagai suatu cara berada paling intens untuk menghadapi realitas kehidupan. Agama bisa menciptakan suatu etik kehidupan dalam artian merombak yang lama, bisa juga mempertemukan corak intern yang menetap dalam satu agama dengan gejala historis dari luar, dan bisa juga sama sekali tidak berfungsi. Tesis Weber, menemukan kesesuaiannya dengan paham teologis Calvinisme puritan yang paling banyak memupuk suburnya kapitalisme (Sermada, 1981:438).

Selain yang disebutkan di atas, tesis Weber meliputi keanekaragaman realitas historis yang masih berjalan maju. Beliau menawarkan satu paham tentang agama, yakni agama yang transenden, agama yang tidak

terkurung oleh satu sistem perilaku tertentu. Namun, mengundang setiap realitas historis untuk berdialog. Keterbatasan tesis Weber adalah agama diideologisir, sehingga aspek sakralnya kurang kentara. Pembenaan tentang agama cuma berlaku melalui satu usaha ilmiah-verifikasi ilmiah.

Selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, sangat menarik pula memperlihatkan perkembangan pemikir-pemikir agama di kalangan intelektual dan cendekiawan Indonesia. Dalam satu seminar yang mengambil tema "Agama dan Pluralitas masyarakat Bangsa" yang diselenggarakan oleh P3M tanggal 20 November 1990. M. Sastra Prateja menyatakan bahwa salah satu ciri teologi masa kini adalah sifat kritisnya, kritis terhadap agama itu sendiri dan kritis terhadap situasi zamannya, Teologi hanya akan menjadi kritis terhadap lingkungannya apabila agama terbuka terhadap ilmu-ilmu sosial yang akan memperkaya teologi itu sendiri. Dengan kata lain, teologi harus memadukan antara teori dan praktis. Tujuan teologi tidak berhenti pada pemahaman agama saja, tetapi mendorong terjadinya transformasi sosial. Asumsi ini, berawal dari pergeseran tekanan yang sedang terjadi dewasa ini, dari tekanan ortodoksi ke ortopraksis.

Senada dengan pemikiran M. Sastra Prateja, Dewan Raharjo (1992) memunculkan gagasan perlu adanya disfungsi antara "agama masjid" dan "agama profesi". Agama masjid yang dimaksud di sini adalah ciri kehidupan beragama yang lebih menekankan peran kelembagaan dan cenderung untuk memelihara apa yang sudah berlangsung dalam masyarakat maupun agama itu sendiri. Sedangkan, agama profesi menekankan pada ciri keagamaan yang lebih menekankan peran kenabian, peran pembebasan, tanggap terhadap persoalan-persoalan konkrit masyarakat (dalam mingguan, 1992:6-7).

Jika kita cermati dengan seksama bahwa dalam dirinya sendiri, agama mengandung nilai-nilai positif untuk

transformasi kehidupan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, kita sah saja jika hendak mempertanyakan agama dan “fungsinya”. Yang jelas, agama potensial untuk mengambil peranan yang konstruktif dalam keseluruhan dinamika hidup manusia. Hal yang perlu kita persoalkan adalah ketika agama maupun pelaku agama direkayasa untuk kepentingan politis seseorang, kelompok, dan golongan tertentu. Di sinilah fungsi agama mengalami pemiskinan makna dan tujuannya.

Contoh kasus pada tahun 1989 dapat dimunculkan di sini, ialah ketika Haji Alamsyah Ratuprawiranegara, mantan menteri agama dan Menko Kesra, membuat kebulatan tekad yang ditanda tangani 21 Ulama dan tokoh Islam, yang isinya, minta Sidang Umum, MPR mencalonkan Bapak Suharto menjadi presiden 1993-1998. Hal yang mencolok lagi, ketika pada bulan Mei 1992, melalui sebuah upacara di Jakarta — yang dituduh sementara orang sebagai “DOA POLITIK” — Alamsyah kembali mengumpulkan 37 ormas Islam untuk mendoakan Soeharto agar terpilih lagi sebagai presiden. Terlepas dari semua itu tokoh yang banyak di kecam oleh orang-orang DPP Golkar pada waktu itu kemudian menduduki kursi empuk anggota F-KP di MPR dan Badan Pekerja MPR.³ Kejadian semacam itu cukup sering terjadi di negeri kita. Berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), misalnya, pada awalnya juga menimbulkan suatu perdebatan karena banyak mensinyalir bahwa lembaga ini akan menjadi instrumen politik, semacam alat pembuat “Kebulatan Tekad”.

Selain contoh di atas, pada saat ini, di era reformasi sedang gencar-gencarnya di dengung-dengungkan pernyataan-pernyataan senada sering pula kita dengar. Misalnya, pernyataan ketua PPP Hamzah Has di RCTI 11 Juni 1999 pk. 23.15 Wita yang menyatakan sikap tegas PPP tidak akan mencalonkan Wanita sebagai Capres dan orang yang tidak “betul-betul” beragama Islam. Pernyataan ini, bila dicermati dari sudut pandang berbangsa

dan bernegara yang dilandasi demokrasi Pancasila sangat bertentangan sekali. Pernyataan-pernyataan itu adalah semacam “dagelan politik” atau semacam “politik murahan”.

Sebuah pemikiran yang sangat jernih dikemukakan Djohan Effendi (Kompas, 1992:6) mengatakan bahwa agama mempunyai fungsi legitimasi dan kritik terhadap negara. Ini harus dibedakan dengan segala bentuk manipulasi agama sebagai fungsi legitimatif dan ideologi alternatif. Kedua bentuk manipulasi ini pada dasarnya berupaya untuk mensubordinasikan agama kepada kekuasaan yang tentu saja tidak lepas dari berbagai kepentingan politik. Agama pada tatanan ini jatuh sebagai alat politik. Fungsi legitimasi yang benar adalah pengukuhan agama terhadap aktivitas kehidupan bernegara yang dilihat perspektif ajaran agama. Ini sangat penting agar masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara aktif dan optimal tanpa hambatan psikologis. Dalam mengimbangi fungsi legitimasi tersebut, agama harus mampu menjalankan fungsi kritik. Melalui fungsi kritis inilah peran agama sebagai landasan moral, etik, dan spiritual dalam pembangunan menjadi kenyataan.

2.2. Fungsi Agama

Akhir-akhir ini wacana tentang identitas merupakan salah satu sarana sentral dalam kaitannya dengan perkembangan globalisasi. Misalnya, perbincangan mengenai identitas dikaitkan dengan kekhawatiran melunturnya nasionalisme, nilai-nilai moral, etik, dan sekaligus identitas nasional. Hal ini disebabkan pengaruh media masa dan informasi global dengan segala janji, harapan, kegairahan, dan kesenangan yang ditawarkannya.

Piliang (1998:335) menyebutkan indikator-indikator yang menyebabkan perubahan itu sebagai berikut :

- (1) Perkembangan sistem teknologi tampaknya akan terus berlanjutan dan akan

mempengaruhi keputusan-keputusan estetik;

- (2) Tekanan ekonomi pasar bebas telah mengubah konsep manusia postmodern tentang waktu, diri, individu, keluarga, masyarakat, ruang, bangsa, dan negara;
- (3) Tekanan moral menyangkut kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat, termasuk tekanan-tekanan pada obyek kebudayaan.

Jika kita lihat ketiga indikator tersebut di atas, maka tantangan di era kesejagatan dan milenium ketiga adalah bagaimana menyatukan dan meramu ketiga kekuatan tersebut secara arif, dengan menjadikan kekuatan agama sebagai fondasinya. Berbagai krisis yang melanda bangsa akhir-akhir ini tidak lepas dari rendahnya spirit-spirit keagamaan yang dihayati insani. Dengan demikian, agama harus dijadikan sebagai *way of life*, sehingga tidak menjadi benteng terakhir, akan tetapi justru menjadi energi dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Pada kenyataannya, konsep-konsep kejujuran, keterbukaan, kerja keras, kesederhanaan yang diperlukan dalam kanvas globalisasi ekonomi dan informasi dewasa ini adalah konsep-konsep yang berakar dari agama. Sejalan dengan ini, Tjokorda Rai Sudartha (1995:31) menyatakan ada satu nilai yang kiranya sangat perlu direnungkan bersama, untuk meningkatkan kewaspadaan kita pada nilai-nilai yang berkembang dari suatu zaman ke zaman berikutnya. Nilai-nilai tersebut, misalnya berkaitan dengan kepemimpinan, etika, dan moral, pendidikan masyarakat, pengorbanan, kejujuran, dan pentingnya SDM.

Oleh sebab itu, menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi dari berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menghadapi milenium ketiga, dan era kesejagatan.

II. PENUTUP

Setiap agama menemukan diri dalam sejarah melalui suatu peranan. Peranan agama

itu mengalami gangguan bila situasi historis ditantang oleh kesadaran baru. Nilai dan peranan tertentu yang selama ini sudah mendarah daging diuji kembali dan barangkali dimatikan secara perlahan-lahan menuju suatu penemuan nilai dan peranan baru.

Fungsi agama yang telah digariskan terasa amat berat dalam menghadapi tantangan zaman; terobosan di bidang sosio-budaya, politik begitu cepat, sementara teologi bergerak amat lambat. Namun, fungsi agama sebagai "perekat sosial baru" tetap satu, ia harus tetap mempertahankan identitasnya sebagai pembimbing etik dan moral, tanpa jatuh direkayasa untuk kepentingan-kepentingan partikular yang tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Herder. 1973. *The Origins and Development of the Marxist Critique of Religion*.
 Masalah *Mingguan Hidup*. 1 November 1992 No. 44 Th. XLXI.
- Mosse, Julia Cleves 1996. *Gender Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Dea, Thomas. 1978. *The Sociology of Religius*. New York.
- Sermada, Don, 1981. "Teori-teori tentang Fungsi Agama" dalam majalah *Basis*. November XX. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudartha, Tjakorda Rai. 1995. "Sastra Tradisional dan Nilai-Nilai Dharma Negara" dalam *Warta Hindu Dharma* No. 339 Th XXVH, Juli 1995. Denpasar Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Piliang, Yasraf Amir. 1998. *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan, Menjelang Milenium Ketiga dan Nantinya Pasmodemisme*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Puja, Gde dan Tjokorda Rai Sudartha. 1976/1977. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Junasco.
- Waters, Nalcom. 1995. *Globalization*. London and. New York.